

KAMPANYE STRATEGIS MELAWAN RADIKALISME: MERANCANG MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A STRATEGIC CAMPAIGN AGAINST RADICALISM: A PLANNING MODEL FOR MULTICULTURAL EDUCATION

Yosef Keladu Koten

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero,

Maumere 86152, Flores, NTT

Pos-el: yosaya_25@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v17i1.107.3-26>

Abstract: Radicalism seriously threatens modern pluralistic communities. In recent times, many national states have put in place strategic plans to fight against radicalism, or to lessen the impact of radical ideas or behaviour. This is known as the process of de-radicalisation. This isn't an easy process there are many reasons behind the growth of radicalism. One of these is the simple acceptance of differences without trying to understand those differences and the similarities of the people of a country. This can be signified by, and caused by a process of uniformity, which can be seen in the system of education. With this in mind, this article proposes a strategic, effective campaign against radicalism, beginning with a model of multicultural education. Multicultural education promotes the principle of inclusiveness, diversity, democracy and critical thinking which is appropriate for a pluralistic country which enables the education of people to live in a multicultural community.

Keywords: Radicalism, inability to think, diversity, ideology, multiculturalism, multicultural education.

Abstrak: Radikalisme menyebabkan ancaman serius terhadap komunitas pluralistik modern. Selama beberapa dekade terakhir,

banyak negara di dunia menetapkan rencana-rencana strategis untuk berperang melawan radikalisme atau untuk mengurangi ide-ide atau perilaku radikal. Yang terakhir ini disebut dengan proses de-radikalisasi. Proses seperti ini tidak gampang karena banyaknya alasan di balik munculnya radikalisme dan salah satunya ialah karena adanya perilaku menerima begitu saja perbedaan tanpa ada upaya untuk memahami perbedaan dan kesamaan semua anggota dari sebuah negara. Hal ini ditengarai, disebabkan salah satunya oleh proses penyeragaman, termasuk dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan sebuah kampanye strategis yang efektif untuk melawan radikalisme yaitu dimulai dengan merancang sebuah model pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mempromosikan prinsip inklusi, diversitas, demokrasi, dan pemikiran kritis yang cocok untuk sebuah negara plural yang memampukan peserta didik untuk hidup dalam sebuah komunitas multikultural.

Kata-kata Kunci: radikalisme, ketidakmampuan berpikir, kebhinekaan, ideologi, multikulturalisme, pendidikan multikultural

PENDAHULUAN

Radikalisme dan terorisme selalu menebarkan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan karena itu memunculkan tantangan serius terhadap pluralitas yang menjadi ciri khas komunitas politik kontemporer. Keduanya selalu disandingkan, sekalipun diakui bahwa radikalisme merupakan embrio atau petunjuk ke arah terorisme. Kenyataan menunjukkan, sebagian besar teroris mengawali perjuangan mereka dengan menjadi militan yang diradikalisasi dan sekalipun semua teroris adalah kaum radikal tetapi tidak semua kaum radikal secara otomatis berakhir sebagai teroris. Karena itu, 'kampanye melawan radikalisme' harus menjadi program strategis jangka panjang dalam 'perang melawan terorisme'. Inilah keyakinan dasar Ömer Taşpinar yang menganjurkan, perjuangan melawan radikalisme dengan penekanan pada perkembangan manusia yang utuh dan sempurna hendaknya muncul sebagai sebuah narasi publik baru dan tujuan jangka panjang dari perang melawan terorisme.¹

1 Ömer Taşpinar, "Fighting Radicalisme, not 'Terrorism': Root Causes of an International Actor Redefined," dalam *SAIS Review*, Vol. XXIV, No. 2, The John Hopkins University Press, 2009, hlm. 76.

Namun, ‘kampanye melawan radikalisme’, tidaklah gampang karena alasan munculnya radikalisme itu sendiri sangat kompleks dan rumit. Faktor-faktor pendukung radikalisme itu banyak dan beranekaragam atau tidak ada jalan tunggal ke arah radikalisasi. Sebaliknya, ada banyak faktor yang terkait satu sama lain yang memunculkan radikalisme dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. David A. Snow dan Remi Cross, misalnya, mengaitkan radikalisme dengan gerakan-gerakan sosial pada level akar rumput dan karena itu menyimpulkan, situasi dan kondisi pada akar rumput memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan identitas radikal atau menyediakan ruang bagi kaum radikal untuk bebas mengasosiasikan diri dan mengembangkan afinitas dengan kelompok-kelompok radikal.²

Menurut penulis kondisi akar rumput tidaklah menjadi alasan kalau sejak dini orang dibiasakan untuk hidup dalam keberagaman dengan menghormati perbedaan dan kesamaan yang diperoleh lewat proses pendidikan yang benar dan tepat. Kenyataan umum menunjukkan, alasan utama munculnya radikalisme ialah karena adanya sikap tidak menerima perbedaan sebagai sebuah pemberian. Bahkan, walaupun diterima, keberagaman atau kenyataan bahwa kita berbeda diandaikan begitu saja tanpa disertai dengan pemahaman yang benar tentang mengapa kita berbeda dan kurangnya penekanan pada kesamaan atau kesederajatan kita sebagai manusia. Hal ini ditengarai, disebabkan salah satunya oleh proses penyeragaman, termasuk dalam sistem pendidikan.

Oleh karena itu, di dalam artikel ini penulis beragumen bahwa kampanye strategis jangka panjang melawan radikalisme hendaknya dimulai dengan merancang sebuah model pendidikan multikultural, yang bertujuan untuk menanamkan sejak dini dalam diri peserta didik perspektif global dan sekaligus mempromosikan prinsip inklusi, diversitas, demokrasi, dan pemikiran kritis yang cocok untuk sebuah negara plural. Pendidikan multikultural juga penting dalam merekonstruksi kebhinekaan ke arah multikulturalisme, yang memberi penekanan bukan hanya pada

2 David A. Snow dan Remi Cross, "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types," dalam *Journal of Strategic Security*, Vol. 3, 2011, hlm. 118.

kenyataan adanya perbedaan tetapi juga kesamaan kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai bangsa. Tetapi, sebelum diuraikan pentingnya pendidikan multikultural dan bagaimana merekonstruksi kebhinekaan ke arah multikulturasime, akan dijelaskan terlebih dahulu keterkaitan antara radikalisme dan ketidakmampuan berpikir. Hal ini penting karena sikap tidak menghormati perbedaan berawal dari ketidakanggapan orang berpikir kritis, mandiri, dan representatif.

RADIKALISME DAN KETIDAKMAMPUAN BERPIKIR

Harus diakui, radikalisme merupakan bagian dari gerakan perubahan karena kaum radikal mempunyai komitmen kuat untuk mengubah sebuah struktur bukan hanya pada lapisan superfisial tetapi pada lapisan yang paling mendasar atau fundamental. Sebagai sebuah gerakan perubahan yang bersifat total dan revolusioner, radikalisme selalu dikaitkan dengan upaya penjungkirbalikan nilai-nilai atau tatanan sosial politik yang ada dengan menggunakan sarana kekerasan.

Namun, sebuah gerakan radikal bukanlah tanpa alasan dan tanpa tujuan. Pada umumnya, radikalisme merupakan reaksi atas persoalan atau kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada. Jadi, ada alasan valid dan masuk akal munculnya reaksi-reaksi perlawanan radikal seperti, perasaan frustrasi akibat adanya penghinaan, deprivasi kolektif, kondisi kemiskinan, ketidakadilan nasional ataupun internasional, dan imperialisme modern oleh negara-negara adidaya. Berkaitan dengan tujuan, radikalisme tidak sekedar menolak tatanan yang dianggap tidak adil dan opresif, tetapi juga berupaya untuk mengganti tatanan lama dengan yang baru. Dalam konteks ini, radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang bertujuan untuk memperjuangkan perubahan sosial dan politik. Atau, sebagaimana ditegaskan oleh Snow dan Cross, kaum radikal ada di mana-mana karena seorang radikal merupakan bagian dari aktivis gerakan sosial yang mengambil pilihan berisiko tinggi dan bertindak secara langsung dengan menggunakan kekerasan demi mencapai sebuah tujuan.³

3 *Ibid.*, hlm. 118.

Radikalisme, yang muncul entah dalam bentuk perilaku ataupun paham selalu menampilkan karakteristik intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner.⁴Ciri pertama intoleransi menunjuk pada sikap yang tidak mau atau tidak rela menghormati pendapat atau keyakinan orang lain yang berbeda dengan keyakinan sendiri. Benih-benih radikalisme muncul ketika orang memutuskan pertemanan hanya karena tidak mau mendengar lagi pandangan yang bertentangan dengan pandangannya sendiri atau kalau orang hanya mendengar informasi atau berita yang mengafirmasi pandangannya sendiri.

Ciri kedua fanatisme berkaitan erat dengan keyakinan atau perilaku tidak kritis. Orang dianggap fanatik kalau dia dikuasai oleh antusiasme obsesif dengan keyakinan atau ideologinya sendiri dan mengabaikan sama sekali keyakinan atau pendapat orang lain. Filsuf Amerika, George Santayana mendefinisikan fanatisme sebagai “*redoubling your effort when you have forgotten your aim.*”⁵ Pada umumnya, orang-orang fanatis taat pada standar sendiri yang sangat keras dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan. Mereka merasa diri selalu benar dan yang lain selalu dianggap salah.

Ciri ketiga eksklusivitas adalah sikap tertutup dengan berupaya untuk mengeluarkan orang lain karena dianggap tidak memenuhi standar yang ditentukan sendiri. Orang-orang eksklusif tertutup dalam dirinya sendiri dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Mereka menganggap diri paling baik dan benar dan dengan itu membedakan diri mereka dari orang lain. Benih radikalisme muncul ketika terbentuk sebuah ikatan tertutup dan sekaligus identitas kolektif yang dipahami sebagai sebuah “*shared sense of we-ness or one-ness anchored in real or imagined shared attributes and experiences among those who comprises the collectivity and in relation or contrast to one or more actual or imagined sets of others.*”⁶

Pola relasi yang dibangun di antara anggota kelompok eksklusif adalah politik identitas, sebuah relasi saling menegasikan antara kita

4 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme—ISIS,” dalam *belmawa ristekdikti.go.id*.

5 George Santayana, *Life of Reason in Common Sense* (New York: Charles Scribner's Sons, 1905), hlm. 13.

6 Davd A. Snow dan Remi Cross, *op. cit.*, hlm. 120.

dan mereka, antara mayoritas dan minoritas, dan antara elitis dan jelata. Relasi ini terpusat pada perasaan ‘ke-kitaan’ dan bahkan perasaan seperti ini dijadikan sebagai perekat tunggal kolektivitas.⁷ Dalam relasi seperti itu, ada anggota—pada umumnya kaum minoritas—yang dinegasikan atau dikeluarkan dari kelompok tertentu—kelompok mayoritas—karena dianggap tidak sejalan, berbeda dan bahkan lebih parah dari itu karena dianggap merusakkan tatanan hidup yang dicita-citakan. Kelompok eksklusif identik dengan massa dalam rezim totaliter, di mana mereka dikumpulkan bersama oleh sebuah kesadaran akan interesse bersama dan bukan interesse pribadi. Secara individual, mereka tidak memiliki tujuan pribadi dan bahkan, mereka tidak diizinkan untuk memiliki interesse dan tujuan pribadi. Adalah keniscayaan bagi semua anggota kelompok radikal bukan hanya untuk memiliki tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan interesse bersama dengan berbagai macam cara, termasuk cara kekerasan.

Ciri revolusioner berkaitan dengan penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan atau agenda tersembunyi. Seorang revolusioner, menurut Sergey Nechayev, adalah pribadi yang gagal karena orang-orang seperti itu tidak mempunyai interesse pribadi, tidak mempunyai urusan, sentimen, keterikatan dengan orang lain, atau bahkan tidak mempunyai namanya sendiri. Seluruh keberadaannya digayang atau ditelan oleh satu tujuan, satu pemikiran, satu keinginan—revolusi. Dia adalah musuh yang tidak berbelaskasihan dan hanya memiliki satu tujuan dalam hidup, yaitu menghancurkan yang lain atau yang berbeda dengan apa yang diyakininya.⁸

Perilaku paling menonjol kaum revolusioner ialah konformitas, yang menghancurkan keunikan masing-masing anggotanya karena mereka dituntut untuk bertindak sebagai satu keluarga besar dan memiliki hanya satu pendapat atau interesse yang sama. Tidak ada ruang bagi masing-masing individu untuk membedakan diri mereka entah dalam bertindak atau berbicara. Semua orang yang berada dalam kolektivitas tersebut “*are*

7 “Politik Identitas,” dalam www.wikipedia.org.

8 Sergey Nechayev, *Catechism of Revolutionary*, 1869, dalam <https://www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm>.

all imprisoned in the subjectivity of their own singular experience.”⁹ Konformitas mengeliminasi kebebasan orang untuk bertindak. Karena orang tercerabut dari kesempatan untuk berbicara tentang sejarah hidup mereka sendiri dan juga nilai dari hasil kerja mereka, maka nasib mereka diputuskan bukan oleh tindakan bebas mereka sendiri tetapi oleh kelompok yang kebetulan memilik kekuasaan ekonomis dan politik.

Kalau kita memperhatikan keempat ciri kaum radikal di atas, tampak jelas bahwa kelompok radikal mengaplikasikan ideologi tertutup karena sistem kepercayaan, bentuk serta praktik simbolik yang merupakan salah satu aspek dari kehidupan sosial didistorsi dan dijadikan ilusi demi mengaburkan dan menutupi realitas sosial yang sesungguhnya.¹⁰ Ideologi tertutup berkecenderungan menerapkan prinsip konsistensi logis atau proses menciptakan kembali realitas untuk membuktikan kebenaran sebuah premis. Dalam konteks ini, orang-orang radikal sudah memiliki premis, keyakinan dan pendapat tertentu dan berusaha untuk membuktikan kebenaran premis tersebut dengan menyesuaikan dunia sekitar dengan premis yang dianggap benar dan valid tersebut.

Hannah Arendt, dalam analisisnya tentang ideologi totalitarian, misalnya mengklaim, dalam upaya untuk mendominasi dunia riil, rezim totaliter menciptakan sebuah dunia fantasi atau sistem tertutup yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan realitas. Sebuah ideologi totaliter mengungkapkan dalam dirinya sendiri potensi tirani karena klaim atau premis absolutnya berfungsi sebagai sarana atau instrumen kekuasaan politik. Dia menulis: *“Insanity of such system clearly does not lie only in their first premise but in their very logicity which proceeds regardless of all facts and regardless of reality.”*¹¹ Dunia riil dipaksakan supaya cocok dengan sebuah model dan dibayangkan dalam sebuah sistem. Seorang yang intoleran, fanatis, eksklusif dan revolusioner selalu cenderung dominan dan memaksakan agar yang lain menjadi serupa atau sama dengan mereka.

9 Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), hlm. 58.

10 John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global*, penerj. Haqqul Yakin (Yogyakarta: IGCiSoD, 2004), hlm. 91.

11 Hannah Arendt, “Social Science Techniques and the Study of Concentration Camps,” dalam *Jewish Social Studies*, Vol. 12, No. 1, Indiana: Indiana University Press, 1950, hlm. 366.

Mereka tidak menerima perbedaan pendapat dan beranggapan bahwa setiap ide, gagasan atau pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka sendiri dianggap sebagai ancaman atas eksistensi dan keberadaan mereka.

Dari uraian tentang ideologi totaliter di atas, tampak jelas bahwa sebuah ideologi muncul dari pandangan dunia atau paradigma sosial tertentu dan digunakan untuk menjustifikasi tindakan radikal atau kekerasan. Ideologi bukan sekedar kata-kata kosong tetapi mengandung kebenaran-kebenaran tertentu yang melegitimasi atau membenarkan tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, ideologi dirumuskan dan selalu ditaati karena mengandung tujuan di dalamnya. Ideologi totalitarian bertujuan utama untuk mendominasi dan sekaligus menyeragamkan pemikiran orang banyak. Atau, sebagaimana ditegaskan Arendt, tujuan utama dari sebuah ideologi totaliter ialah untuk mentransformasi kodrat manusia dengan membujuk mereka menjadi ciptaan ideologis (*ideological creatures*).¹²

Yang ditekankan Arendt ialah kenyataan bahwa orang dijadikan makhluk ideologis lewat indoktrinasi, sebuah proses terencana dan sistematis untuk memasukkan ide tertentu ke dalam pikiran seseorang demi mengubah pikiran orang tersebut. Atau, indoktrinasi merupakan proses menanamkan dalam diri seseorang ide-ide, perilaku-perilaku atau strategi-strategi kognitif dengan cara otoritarian. Ketika orang telah dipengaruhi oleh ide-ide atau lebih tepatnya oleh sebuah sistem ide-ide (ideologi) yang tertutup lewat indoktrinasi atau pencucian otak, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang jahat. Hal yang sama berlaku bagi kaum radikal . Ketika mereka terobsesif dengan sebuah ideologi atau keyakinan tertentu, mereka akan menjadi pribadi yang intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner.

Sebuah ideologi radikal mengarahkan orang untuk meyakini sebuah pendapat atau ide tanpa berpikir dengan menggunakan akal sehat. Atau, orang-orang ideologis tidak mampu berpikir mandiri dan kritis serta hanya mengikuti apa yang dituntut oleh ideologi. Mereka tidak berpikir

12 Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: A Harvest Book, Harcourt Inc., 1951), hlm. 432.

karena tidak mampu mempertimbangkan perspektif orang lain atau dunia plural dalam putusan atau penilaian mereka. Berpikir, sejatinya, adalah berdialog dengan diri sendiri dengan menjadikan realitas sekitar sebagai titik tolaknya. Kaum radikal yang berciri intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner tidak berpikir tetapi berasionalisasi karena mereka menggunakan akal budi semata-mata sebagai instrumen untuk membenarkan tindakan mereka. Inilah yang sering ditemukan dalam alasan kaum radikal atau teroris, di mana mereka mengklaim bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan sesuai dengan perintah agama atau ideologi.

Seorang radikal adalah orang yang tidak mampu berpikir dan kehilangan kebebasan untuk bertindak sendiri karena mereka bertindak bertolak dari ideal yang diambil alih dari orang lain tanpa memahami ideal-ideal tersebut. Contoh paling nyata dari fenomena ini ialah orang-orang Nazi yang terlibat membunuh ribuan orang Yahudi pada pertengahan abad 20. Ditengarai, kaum Nazi bertindak atas dasar ideal *'being omnipotence'* yang ditanamkan oleh ideologi totaliter Hitler. Politik dominasi total yang bertolak dari keyakinan dasar totaliter bahwa 'segala sesuatu mungkin', termasuk kemungkinan masing-masing pribadi untuk menjadi *'omnipotence'* ditanamkan ke dalam diri orang-orang biasa seperti kaum Nazi. Didorong oleh ideal *'being omnipotence'* dan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin, orang-orang Nazi dengan tanpa rasa takut dan bersalah serta tanpa berpikir kritis, mengeliminasi ribuan orang Yahudi.

Ketidakmampuan berpikir menjadikan orang *'hollow'* karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan karena itu gagal untuk mengakui akibat negatif dari tindakan mereka atas orang lain. Atau, seorang yang radikal adalah seorang yang kosong. Segala sesuatu yang membedakan mereka sebagai manusia – dalam hal kemampuan berpikir dan bertindak – dirampas atau dihilangkan sama sekali dari dalam diri mereka sehingga yang ditemukan dalam diri mereka ialah *'the sheer mechanical thoughtlessness'*.¹³ Kaum radikal ialah orang-orang yang tercerabut dari individualitas mereka sebagai pribadi yang bebas dan mandiri akibat

13 Berel Lang, "Hannah Arendt and The Politics of Evil," dalam *Judaism*, Vol. 37, No. 3, 1988, hlm. 269.

dari proses pencucian otak, di mana mereka dicabut dari ideal-ideal atau keinginan-keinginan mereka sendiri dan menggantikan itu dengan ideal-ideal yang datang dari luar, termasuk ideal yang muncul dari ideologi atau agama tertentu.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Keterkaitan antara radikalisme dan ketidakmampuan berpikir seperti diuraikan di atas mengindikasikan kompleksnya problem radikalisme sebagai cikal bakal terorisme. Akibatnya, strategi untuk melawan radikalisme haruslah sebuah strategi komprehensif yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomis dan perbaikan relasi sosial politik lain, tetapi juga merancang sebuah model pendidikan yang menjawab konteks masyarakat yang semakin plural atau multikultural.

Pendidikan yang komprehensif menghindarkan perkembangan pincang dalam masyarakat, di mana ada kemajuan dalam bidang-bidang khusus, namun orang kehilangan perspektif bersama yang merangkai semua kemajuan tersebut. Memang, secara normatif, semua lembaga pendidikan ada untuk membentuk karakter-karakter positif, seperti toleransi, keterbukaan, inklusivitas, dan tenggang rasa dalam diri peserta didik. Tetapi, persoalannya adalah, sebagaimana disinyalir oleh Helmy Faishal Zaini, mengapa perasaan tenggang rasa dan toleransi terejawantah secara sangat baik dalam diri masyarakat kita pada zaman dahulu, di mana pendidikan belum begitu maju, belum banyak orang yang mengenyam pendidikan, bahkan belum mengenal kehidupan kuliah di perguruan tinggi? Atau, secara diametral, mengapa saat ini toleransi dan tenggang rasa semakin memudar, padahal banyak warga negara kita yang mengenyam pendidikan di berbagai tingkatan? Bagi Faishal Zaini, alasan utama melunturnya toleransi, sikap menghormati perbedaan dan aktif menghargai perbedaan dengan cara tenggang rasa adalah krisis keteladanan dan lunturnya nilai-nilai tradisi.¹⁴

Alasan-alasan ini benar tetapi tidak menjawab persoalan karena tidak menyentuh peran atau fungsi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga

14 A Helmy Faishal Zaini, "Beragama di Negara Bhineka," *Kompas*. 19 Februari 2018, hlm. 7.

pendidikan bukanlah sfer publik kosong atau beroperasi dari dan dalam kekosongan. Harus diakui, semua aspek dalam proses belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, seperti guru, kurikulum dan sumber-sumber bacaan memainkan peran krusial dalam perkembangan kepribadian seorang anak didik. Disinyalir, segala sesuatu mulai dari guru sampai pada sumber bacaan bisa, di satu pihak, menanamkan dalam diri anak didik karakter-karakter positif, tetapi, di lain pihak, bisa mengindoktrinasi anak didik dengan pandangan-pandangan yang intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner. Oleh karena itu, menurut penulis, untuk menghindari lembaga pendidikan sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya paham-paham radikal, perlu dikembangkan sebuah model pendidikan multikultural.

James A. Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai sebuah ide, pendekatan terhadap reformasi lembaga pendidikan dan gerakan demi memperjuangkan nilai kesamaan, keadilan sosial, dan demokrasi.¹⁵ Ada berbagai alasan pentingnya pendidikan multikultural, dan yang paling umum diterima ialah untuk merekonstruksi lembaga pendidikan sehingga karakter semua anak didik dibentuk dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dalam sebuah negara multikultural mereka peroleh. Atau, pendidikan multikultural dirancang untuk mempromosikan prinsip-prinsip yang cocok untuk sebuah negara plural seperti inklusi, diversitas, demokrasi, dan pemikiran kritis. Pendidikan seperti ini mengakomodasi model interkultural yang mengembangkan ide inklusi di mana individu dan kelompok yang berbeda-beda dinilai sama dan sederajat karena keyakinan bahwa perbedaan kultural merupakan kekuatan dan sekaligus sumber daya dalam proses belajar mengajar dan bukan sebagai problem yang harus diatasi.

Pendidikan multikultural merupakan sebuah konsep yang luas karena mengandung begitu banyak aspek atau dimensi penting yang berbeda-beda. Namun, sebelum kita berbicara tentang strategi dan metode, termasuk kurikulum, perlu ditegaskan bahwa hal pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam rangka mengembangkan sebuah model

15 James A. Banks, "Multicultural Education—History, the Dimensions of Multicultural Education, Evidence of the Effectiveness of Multicultural Education," dalam <http://education.stateuniversity.com/ /Multicultural-Education.html>.

pendidikan multikultural adalah mentransformasi lembaga pendidikan homogen menjadi heterogen. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan hendaknya mengakomodir atau terbuka menerima pendidik, tenaga kependidikan ataupun peserta didik dari berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Inilah yang disebut imperatif demografis, yang mengklaim bahwa program pendidikan haruslah relevan dengan semakin banyaknya peserta didik dari budaya lain, agama, ras, etnis lain.¹⁶ Tetapi, kebutuhan akan multikulturalisme di lembaga-lembaga pendidikan melampaui respons terhadap perubahan dalam pola demografis. Tuntutan lain yang juga penting adalah menginkorporasi kelas-kelas multikultural, di mana ada interaksi antara peserta didik dari sebuah sekolah tertentu dengan kelompok peserta didik dari sekolah-sekolah lain.

Ketika peserta didik berinteraksi dengan kelompok ras atau etnis lain di dari sekolah lain, mereka akan memperoleh informasi yang luas tentang kebudayaan orang lain yang belum pernah mereka dengar atau dapatkan sebelumnya. Berkaitan dengan ini tanggung jawab seorang guru atau pendidik adalah menyajikan kepada peserta didik pengalaman-pengalaman tentang berbagai macam budaya dan bukan sekedar menyuruh mereka membaca buku-buku atau sumber-sumber yang ditulis oleh orang dari budaya mereka sendiri. James A. Banks menegaskan: *“The schools should help students to break out their cultural enclaves and to broaden their cultural perspectives. Students need to learn that there are cultural and ethnic alternatives within our society that they can freely embrace.”*¹⁷

Imperatif demografis di atas harus dilengkapi dengan sistem pendidikan dan karena itu James A. Banks mengemukakan beberapa dimensi penting pendidikan multikultural, yang secara konseptual berbeda tetapi dalam praktik semuanya berkaitan satu sama lain. Dimensi-dimensi tersebut antara lain: integrasi konten, proses pembentukan pengetahuan, pengurangan prasangka, dan pemberdayaan budaya sekolah.¹⁸

16 Lester D. Friedman, “Struggling for America’s Soul: A Search for Some Common Ground in the Multicultural Debate,” dalam *Shared Differences: Multicultural Media and Practical Pedagogy*, Diane Carson dan Lester D. Friedman (eds.), Chicago: University of Illinois Press, 1995, hlm. 6.

17 James A. Banks, *loc. cit.*

18 *Ibid.*

Dimensi integrasi konten berkaitan erat dengan kreativitas pendidik atau guru dalam memberikan ilustrasi tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, generalisasi-generalisasi dan teori-teori kunci dalam materi pengajaran mereka. Harus diingat bahwa pengajaran multikultural tidak akan efektif di tangan guru-guru yang memiliki perilaku negatif terhadap kelompok-kelompok ras, etnis, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Di samping perilaku yang harus positif dan sensitif, guru harus kreatif dalam memasukkan contoh-contoh dan konten-konten dari berbagai budaya dan kelompok ke dalam materi pengajaran mereka. Pendidik juga harus terlatih untuk mampu menciptakan diskusi dalam kelas tentang budaya yang berbeda dari budaya mereka sendiri. Untuk maksud ini, seorang pendidik multikultural diharuskan untuk membaca sumber-sumber terbaik yang tersedia, mempersiapkan materi sebaik mungkin, memahami skope dan fokus dari materi yang mau diajarkan, menunjukkan interesse dalam bidang yang diampuh, mengkomunikasikan dengan penuh antusiasme dan selalu terbuka dengan penelitian dan interpretasi-intrpretasi baru.¹⁹

Pendidik juga hendaknya mempraktikkan literasi kritis dengan mengajukan pertanyaan yang membuat anak didik menganalisis, mempersoalkan dan merefleksikan apa yang mereka baca. Hal ini mengandaikan, pendidik melampaui sekedar kesadaran tentang, respek terhadap, dan pengakuan umum akan kenyataan bahwa kelompok yang berbeda-beda mempunyai nilainya sendiri atau mengungkapkan nilai yang sama dalam cara yang berbeda. Tujuan ini tercapai kalau pendidik sangat hati-hati dalam memilih literatur bacaan, dalam arti literatur yang tidak mengandung stereotip kultural dan diskriminasi, membantu peserta didik untuk mengeksplorasi perbedaan, memperkaya pemahaman tentang sejarah dan pengalaman hidup dari orang-orang yang ada dalam budaya tertentu, menunjukkan bagaimana orang berjuang memecahkan isu-isu sosial, dan mengeksplorasi sistem-sistem makna yang ada dalam kebudayaan yang dipelajari. Para pendidik atau guru, sebagaimana diklaim oleh Henry Giorux, harus menyadari diri sebagai seorang pegiat kebudayaan yang bertugas menyediakan teori, term-term teknis

19 Lester D. Friedman, *op, cit.*, hlm. 6.

dan keterampilan-keterampilan yang mampu mengurangi dominasi kebudayaan dominan dan membentuk sebuah kebudayaan demokratis. Para pendidik seperti ini akan berjuang merawat kebudayaan demokratis, mendidik peserta didik ke arah demokratis dan mempromosikan kewarganegaraan dan pendidikan moral.²⁰

Terkait dengan dimensi proses pembentukan pengetahuan, ditegaskan pentingnya kesadaran peserta didik untuk memproduksi pengetahuan sendiri dan bukan sekedar pemakai pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain. Karena itu, proses pengajaran dalam ruang kelas harus mampu membantu peserta didik untuk menyadari bahwa pengetahuan yang bakal mereka miliki merupakan produk dari keaktifan mereka dalam memahami dan menginvestasi asumsi-asumsi, kerangka-kerangka referensi, dan berbagai perspektif kultural yang beranekaragam. Pedagogi multikultural berupaya untuk merekonseptualisasi dan memperluas kanon-kanon umum atau universal untuk menjadikan itu lebih representatif dan inklusif dari diversitas bangsa, dan untuk membentuk kembali kerangka-kerangka referensi, perspektif dan konsep-konsep yang membentuk pengetahuan.

Dimensi pengurangan prasangka menunjuk pada upaya untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan perilaku yang positif dan demokratis. Hal ini berkaitan dengan dimensi terakhir pemberdayaan budaya sekolah, dalam arti merestrukturisasi kembali budaya dan organisasi lembaga pendidikan sehingga peserta didik dari berbagai kelompok ras, etnis, sosioekonomis dan bahasa mengalami kesamaan. Pemberdayaan struktur sekolah menuntut penciptaan hubungan yang berbeda secara kualitatif di antara berbagai kelompok dalam sekolah. Relasi didasarkan pada respek timbal balik dan resiprokal bagi perbedaan-perbedaan kultural yang direfleksikan dalam tujuan-tujuan, norma-norma, dan praktik-praktik kultural.

Situasi dan kondisi dalam lembaga pendidikan seperti ini dengan sendiri dapat mengurangi prasangka di antara peserta didik. Atau, untuk mengurangi prasangka, suasana lembaga pendidikan haruslah kondusif,

20 Ide Henry Giouroux yang dikutip dalam artikel ini diambil dari uraian Douglas Kellner. Bdk. Douglas Kellner, *Teori Sosial Radikal*, penerj. Eko – Rindang Farichah (Yogyakarta: Syarikat, 2003), hlm. 254-255.

dalam arti bahwa peserta didik dapat berrelasi dalam semangat kooperatif dan bukannya kompetitif, semua mengalami bahwa mereka diperlakukan sama, dan setiap relasi yang dibangun di antara peserta didik dari berbagai kelompok yang berbeda direstui atau diafirmasi dan bukannya dicela atau dipersalahkan oleh otoritas seperti orang tua dan guru-guru.

DARI KEBHINEKAAN KEPADA MULTIKULTURALISME

Model pendidikan multikultural penting dalam menginternalisasi ide-ide tentang pentingnya respek, kesamaan, diversitas, dan demokrasi, yang berguna dalam mencegah paham-paham atau tindakan-tindakan radikal. Sebagaimana dikatakan di atas, radikalisme muncul karena sikap tidak mau menerima perbedaan. Dalam konteks Indonesia, persoalan krusialnya adalah mengapa perbedaan atau keberagaman (kebhinekaan) yang pernah dibangga-banggakan oleh Bapak Pendiri Bangsa kita sebagai kekuatan pemersatu bangsa, kini menjadi sumber persoalan? Apakah hal ini merupakan tanda atau bukti bahwa kekokohan bangunan kesadaran sosial negara kebangsaan atau perasaan ke-Indonesiaan kita sudah mulai keropos atau rapuh? Tetapi kalau jawaban pertanyaan ini bersifat afirmatif, lalu pertanyaan lanjutannya adalah mengapa perasaan ke-Indonesiaan kita begitu gampang menjadi rapuh?

Hemat penulis tindakan-tindakan radikal atas nama agama atau ideologi tertentu, atau fenomena umum kerapuhan perasaan ke-Indonesiaan kita saat ini tidak terlepas dari sosialisasi doktrin kebhinekaan yang terlalu menekankan aspek keberagaman atau kenyataan bahwa kita berbeda tanpa disertai dengan pemahaman yang benar tentang mengapa kita berbeda dan kurangnya penekanan pada kesamaan atau kesederajatan kita sebagai bangsa, secara khusus, ataupun sebagai manusia, secara umum. Dalam sosialisasi kebhinekaan selama ini, lebih banyak ditekankan tentang upaya merawat akal budi agar kita semakin menghargai perbedaan dan mencintai tanah air dan bangsa tempat di mana kita dilahirkan.

Masalah utamanya ialah bahwa kalau kita menekankan perbedaan tanpa sungguh-sungguh melihat kesamaan, kita mendasarkan kebhinekaan di atas dasar yang rapuh, bagaikan orang membangun rumah di atas pasir.

Karena itu, sebagai bagian dari kampanye strategis melawan radikalisme, penulis menganggap penting untuk berbicara tentang urgensi merekonstruksi kebhinekaan ke arah multikulturalisme, yang menekankan keanekaragaman dalam kesederajatan. Pentingnya kesamaan sangat tampak dalam pemikiran para pendukung teori multikulturalisme. Salah satu contohnya adalah Will Kymlicka, yang menekankan bahwa sebuah teori keadilan yang komprehensif dalam sebuah negara multikultural harus mencakupi keduanya, hak-hak universal yang dilekatkan pada individu-individu tanpa memperhitungkan keanggotaan mereka pada satu kelompok ras atau etnis tertentu dan juga hak-hak khusus sebagai kelompok atau 'status khusus' bagi kebudayaan-kebudayaan minoritas.²¹

Multikulturalisme merupakan sebuah wacana politik yang muncul akhir-akhir ini sebagai respons terhadap situasi dan kondisi negara yang semakin plural atau terhadap diversitas kultural dan religius. Politik multikulturalisme muncul dari kesadaran bahwa toleransi akan perbedaan kelompok tidak lagi sesuai dengan ide bagaimana memperlakukan semua orang secara sama. Ada berbagai cara untuk mendefinisikan konsep multikulturalisme ini. Secara deskriptif, term multikultural digunakan untuk mengkarakterisasikan kenyataan diversitas dalam sebuah negara dan secara preskriptif, term tersebut digunakan dalam konteks negara demokratis liberal.²²

Proponen multikulturalisme menolak ide tentang '*melting pot*', di mana anggota kelompok minoritas diharapkan untuk mengasimilasikan diri mereka ke dalam kebudayaan dominan. Ketimbang asimilasi, ditekankan pentingnya setiap kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas kolektif dan praktik-praktik khas mereka. Hannah Arendt, misalnya, ketika menilai tindakan seorang Yahudi, Rahel Varnhagen, yang berjuang untuk mengasimilasikan diri ke dalam tradisi Jerman, mengatakan bahwa upaya tersebut sia-sia karena orang tidak akan pernah menghapus latarbelakang budayanya sendiri, termasuk sebagai seorang Yahudi. Karena itu Arendt menganjurkan, supaya masuk ke dalam sejarah asing

21 Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 6.

22 Multiculturalism, dalam <https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism>.

atau hidup dalam dunia Jerman yang asing, seorang Yahudi harus mampu mengkomunikasikan diri dan pengalaman khususnya sebagai seorang Yahudi dan bukan berasimilasi.²³

Multikulturalisme merupakan sebuah term yang kompleks dan karena itu agak sulit untuk menemukan sebuah definisi yang memuaskan semua aspek. Akibatnya, masing-masing proponent memberikan penekanan pada aspek tertentu. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan definisi Bhiku Parekh tentang multikulturalisme yaitu keanekaragaman yang dilekatkan secara kultural. Menurutnya, secara umum ada tiga bentuk multikulturalisme, antara lain:²⁴ *Pertama*, keanekaragaman subkultural, yang menunjuk pada sekelompok orang yang menjalankan keyakinan dan praktik hidup yang relatif sangat berbeda dengan cara hidup konvensional atau yang dipraktikkan secara luas dan umum. *Kedua*, multikulturalisme perspektif, yang berkaitan dengan sikap kritis terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari budaya yang sudah ada, seperti kaum feminis, pencinta lingkungan hidup, dan lain-lain. *Ketiga*, keanekaragaman komunal, yang dianggap sebagai kesadaran komunitas akan identitas diri khas mereka dan dengan itu menjalankan keyakinan hidup yang berlainan.

Konsep multikulturalisme ini menuntut sebuah pemahaman yang lebih luas tentang inklusi yang menginformasi upaya kita, mengubah parameter debat kita dan mengeksplorasi dasar-dasar umum yang menyatukan kita semua. Upaya-upaya ini penting untuk mendasari keyakinan bahwa kita dapat bertindak adil kepada multiplisitas etnis dan kesatuan kultural. Bertolak dari deskripsi tentang multikulturalisme di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa multikulturalisme tidaklah sama dengan keanekaragaman secara suku, bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme juga mencakupi sebuah pemahaman akan perbedaan, penghargaan dan penilaian atas budaya sendiri dan budaya yang lain, serta keingintahuan tentang yang lain. Hal ini mengandaikan kesamaan tertentu yang tidak bisa dinafikan dan harus dijunjung tinggi.

23 Hannah Arendt, *Jewish Writing*, ed. Jerome Kohn dan Ron Feldman (New York: Schocken Books, 2007), hlm. 26.

24 Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, penerj. Bambang Kukuh Adi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 15-17.

Jadi, dalam multikulturalisme, pengakuan akan kesamaan dan sekaligus pengakuan akan perbedaan sama-sama mendapat penekanan. Hannah Arendt menggambarkan realitas kesamaan dan pluralitas ini dalam pembicaraannya tentang manusia plural (*man*) dan bukannya manusia tunggal (*Man*) yang mendiami dunia ini. Menurutnya, kenyataan fundamental yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa kita semua dilahirkan ke dalam spesies yang sama sebagai manusia, yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain dan sekaligus mengambil makna dari rencana atau tindakan yang dilakukan oleh generasi pendahulu kita. Tetapi harus diingat bahwa kesamaan seperti itu tidak boleh membuat kita lupa akan kondisi pluralitas atau perbedaan yang khas atau unik masing-masing orang. Tidak seorang pun yang akan persis sama dengan orang lain yang pernah, sedang ataupun akan hidup di masa datang.²⁵

Dalam multikulturalisme, sekalipun berbeda, setiap individu mempunyai kemampuan untuk berinteraksi karena adanya karakter umum atau sama yaitu akomodatif, asosiatif, adaptif, fleksibel dan juga kemampuan untuk berbagi. Tetapi, tantangan politik sekarang adalah bagaimana mengartikulasikan kesamaan atau universalitas sedemikian rupa sehingga tidak mengabaikan partikularitas sekelompok orang. Karena itu, yang harus dicari adalah kemungkinan koneksi universal, yang menghubungkan kelompok yang satu dengan yang lain. Tentu saja, titik tolak utama dalam pembicaraan tentang kesamaan martabat manusia kita sebagai sesuatu yang inheren (*bawaan*).

Martabat kita sebagai manusia menjadi dasar utama mengapa semua manusia layak dihormati secara sama. Kesamaan model ini terungkap dalam pentingnya pengakuan akan hak-hak dasar atau asasi manusia. Dalam konteks ini, kemanusiaan merupakan alasan pertama dan utama pentingnya mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain. Ketika masing-masing kita memosisikan kemanusiaan di atas segala-galanya, termasuk di atas ideologi agama, kita membiarkan diri kita terikat untuk menghormati dan menghargai kemanusiaan universal, entah yang ada dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain.

25 Hannah Arendt, *The Human Condition*, *op.cit.*, hlm. 8.

Menempatkan kemanusiaan di atas ideologi agama tidak berarti bahwa kita mengingkari eksistensi dan peran Tuhan dalam hidup manusia, tetapi justru sebaliknya menjadikan Tuhan sebagai sumber inspirasi kemanusiaan universal kita. Menghargai kemanusiaan berarti menghargai yang Maha Menciptakan, Tuhan sebagai sumber inspirasi kemanusiaan.²⁶ Menghormati kemanusiaan, pada gilirannya, akan menghindari orang dari tindakan ekstrem atau radikal.

Selain ditemukan dalam diri manusia seperti kemanusiaan, kesamaan juga harus bisa digali dan ditemukan dalam warisan kebudayaan sebagai sebuah bangsa atau kultur. Dalam konteks Indonesia, kesamaan yang sering kali diabaikan adalah pengalaman masa lalu bersama sebagai bangsa. Ketika bertugas di salah satu pulau kepulauan Karibia, penulis disodori dengan sebuah pertanyaan menantang: mengapa Indonesia, yang terdiri dari begitu banyak pulau, suku dan bahasa merupakan satu negara merdeka dan tetap bertahan sampai saat ini? Pertanyaan ini bisa dipahami karena hampir semua pulau kecil di Karibia merupakan sebuah negara merdeka dengan pemerintahan sendiri.

Berhadapan dengan pertanyaan tersebut di atas, penulis dengan enteng menjawab bahwa hal itu disebabkan karena pada masa-masa menjelang kemerdekaan, semua suku dan bangsa dari pulau yang berbeda-beda bersatu padu mengusir para penjajah. Jadi, pengalaman bersama akan penjajahan dan perjuangan bersama mengusir penjajah menjadi perekat atau dasar mengapa Indonesia tetap menjadi sebuah negara merdeka. Hal inilah yang kurang ditekankan dalam sosialisasi kebhinekaan kita akhir-akhir sehingga tidak mengherankan kalau keanekaragaman berubah menjadi sumber konflik. Pengakuan akan pengalaman bersama sebagai bangsa dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting dalam merajut dan merawat kebhinekaan. Pengakuan akan kesamaan memungkinkan adanya pemahaman atau pengertian timbal balik.

Di samping pengakuan akan kesamaan, perbedaan pun harus diakui karena fakta keberagaman atau kebhinekaan adalah sebuah pemberian (*givenness*), yang tidak bisa dinafikan. Sejak berdirinya, negara Indonesia

26 A. Helmy Faishal Zaini, *op. cit.*, hlm. 7.

sudah berciri multikultural karena adanya keberagaman budaya, agama suku, kelas sosial, dan juga falsafat hidup. Tetapi, mengapa kita berbeda? Apakah hal itu semata-mata karena masing-masing kita dilahirkan dalam sebuah budaya, ras, agama tertentu yang berbeda dari yang lain?

Dalam multikulturalisme, pengakuan akan perbedaan tidaklah sekadar mengakui kenyataan bahwa ada orang yang dilahirkan dalam budaya Jawa, Batak, Bugis, Asmat, Flores, atau ribuan etnis yang lain di Indonesia; atau karena dilahirkan sebagai seorang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, atau berbagai aliran kepercayaan lain. Sebaliknya, dari perspektif multikulturalisme, perbedaan harus dipahami dalam arti keunikan atau autentisitas masing-masing individu atau kelompok dalam mengungkapkan diri di ruang publik.

Autentisitas menuntut bahwa setiap individu atau kelompok sosial tertentu menemukan cara beradanya yang khas, sebuah cara berada yang tidak dipaksakan dari luar tetapi dihasilkan dengan cara kembali ke dalam diri sendiri, ke dalam kelompok sosial sendiri. Hal ini mengandaikan pengakuan bahwa setiap individu atau kelompok sosial bisa membentuk identitas diri mereka sendiri. Harus diakui bahwa pembentukan identitas atau jati diri tidak berlangsung dalam isolasi, tetapi juga bergantung pada pengakuan, respek, dan penghormatan dari orang lain. Jadi, pembentukan jati diri terjadi dalam sebuah dialog berlanjut dan perjuangan dengan orang-orang yang begitu berarti untuk kita.

Pembentukan identitas diri dilengkapi dengan kemampuan individu atau kelompok sosial untuk merumuskan sendiri falsafah hidup dan norma-norma moral sendiri. Karena itu, John Rawls menegaskan bahwa perbedaan hendaklah bertolak dari pengakuan bahwa masing-masing kelompok sosial memiliki falsafat hidup sendiri yang diklaim valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional karena dirumuskan oleh orang-orang yang berakal budi praktis dan sehat. "Semua orang yang mengafirmasi konsepsi politik tertentu bertolak dari dalam pandangan komprehensif mereka sendiri dan darinya ditarik dasar-dasar religius, filosofis, dan moral tertentu."²⁷

27 John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1996), hlm. 144.

Kemampuan individu dan kelompok sosial untuk merumuskan identitas diri dan falsafah hidup, yang berbeda satu sama lain telah diakui sebagai dasar politik pengakuan akan perbedaan. Harus diingat bahwa pengakuan di sini bukanlah sebatas pengakuan verbal bahwa yang lain berbeda dari kita atau sekadar kehati-hatian dalam perlakuan terhadap yang berbeda dengan kita, tetapi lebih sebagai sebuah pengakuan esensial yang bertolak dari keyakinan bahwa yang lain memiliki identitas diri yang otentik dan khas, entah sebagai individu ataupun sebagai kelompok, dan bahwa yang lain mampu merumuskan sendiri sistem atau pola yang mengatur pola tingkah laku mereka, entah di arena privat ataupun publik. Dalam konteks ini, yang lain atau kelompok yang berbeda tidak hanya dibiarkan hidup, tetapi diakui memiliki keunggulan dan nilai-nilai moral tertentu yang layak dihormati.

Indonesia sebagai negara multietnis memperlihatkan kecenderungan kurang bersahabat karena struktur masyarakat organis, di mana relasi antara kelompok etnis bersifat semu. Setiap etnis sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tanpa adanya ruang dialog untuk memecahkan kebuntuan hubungan. Adalah sangat sulit bagi sebuah budaya untuk terbuka terhadap transformasi kalau dia masih sibuk untuk melindungi kebudayaannya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa konflik muncul karena budaya dominan tidak terbuka terhadap kritik dan budaya minoritas tidak rela memperbaiki praktik-praktik yang dituduhkan atau dilekatkan kepada mereka. Karena itu, pengakuan akan kesamaan dan perbedaan hanya bisa efektif dan berdaya transformatif kalau disertai dengan kritik tajam atas kebudayaan sendiri. Atau, hormat dan keterbukaan terhadap semua budaya harus disertai dengan tantangan untuk meninggalkan nilai-nilai intelektual dan moral yang tidak konsisten dengan ideal kebebasan, kesamaan dan kerja sama yang berkelanjutan untuk mencari kebenaran.

PENUTUP

Pendidikan multikultural memperkenalkan peserta didik dengan nilai-nilai dari kebudayaan lain. Hal ini dilakukan dengan adanya lembaga pendidikan heterogen, yang menyediakan situasi yang kondusif, di mana peserta didik berada dan berinteraksi dengan teman-teman dari kelompok

ras, etnis, bahasa dan budaya lain. Di samping ada dan berinteraksi dengan teman dari budaya lain, peserta didik juga diperkenalkan dengan ide-ide, konsep-konsep, klaim-klaim, dan kerangka-kerangka referensi dari budaya lain. Dengan ini, pendidikan multikultural sesungguhnya mempromosikan pentingnya inklusivitas serta respek terhadap dan pengakuan akan kenyataan bahwa kelompok yang berbeda-beda mempunyai nilai-nilai berbeda atau mengungkapkan nilai-nilai yang sama dalam cara yang berbeda.

Dalam konteks pendidikan tinggi atau universitas, model pendidikan multikultural tidak menghambat universitas atau lembaga sejenisnya untuk mengembangkan diri sebagai lembaga ilmiah. Bahkan sebaliknya, sebagai lembaga keilmuan dan nalar, outputnya hendaknya orang yang ahli dalam bidang ilmunya dan sekaligus sanggup mengkomunikasikan secara baik dan benar keahliannya. Pendidikan haruslah komprehensif sehingga dapat membuka mata orang akan saling ketergantungan segala sesuatu dalam universum dan sekaligus menyadarkan orang bahwa dia merupakan bagian utuh dari masyarakat ilmiah. Karena itu, komunikasi, berdiskusi dan bahkan bekerja sama merupakan sesuatu yang niscaya. Semua aspek ini justru penting dalam pendidikan multikultural sehingga tidak pertentangan antara peran universitas dan pendidikan multikultural.

Model pendidikan multikultural ini sangat penting dalam mengorientasi kembali doktrin kebhinnekaan. Kalau selama ini sosialisasi kebhinnekaan sekedar menekankan kenyataan perbedaan bahwa orang dilahirkan dalam budaya, agama dan bahasa yang berbeda-beda, pendidikan multikultural membantu peserta didik untuk memahami mengapa kita berbeda dan kesamaan-kesamaan universal apa saja yang menyatukan kita sebagai manusia dan sebagai bangsa.

Kalau anak-anak sejak dini diperkenalkan dengan sebuah perspektif global, positif dan menyeluruh tentang berbagai macam budaya dan agama yang beranekaragam, maka mereka akan berkembang menjadi pribadi yang terbuka dan bukan sebaliknya menjadi pribadi obsesif atau ideologis, yang intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner. Produk pendidikan multikultural adalah pribadi-pribadi yang mampu berpikir mandiri dan

bebas, serta cinta akan nilai inklusi, diversitas, kesamaan dan demokrasi, nilai-nilai yang sangat cocok dan berguna dalam sebuah negara plural atau multikultural. Harus diakui bahwa kalau semua orang memiliki nilai-nilai ini lewat proses pendidikan multikultural, maka kampanye strategis jangka panjang melawan radikalisme akan membuahkan hasil yang positif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arendt, Hannah. "Social Science Techniques and the Study of Concentration Camps." Dalam *Jewish Social Studies*, Vol. 12, No. 1, Indiana: Indiana University Press, 1950.
- _____. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.
- _____. *The Origins of Totalitarianism*. New York: A Harvest Book, Harcourt Inc., 1951.
- _____. *Jewish Writing*. Jerome Kohn dan Ron Feldman (eds.). New York: Schocken Books, 2007.
- Kellner, Douglas. *Teori Sosial Radikal*. Eko-Rindang Fachrah (pen.). Yogyakarta: Syarikat, 2003.
- Lang, Berel. "Hannah Arendt and The Politics of Evil." Dalam *Judaism*, Vol. 37, No. 3, 1988.
- Faishal Zaini, A. Helmy. "Beragama di Negara Bhineka." *Kompas*. 19 Februari 2018.
- Friedman, Lester D. "Struggling for America's Soul: A Search for Some Common Ground in the Multicultural Debate." Dalam Diane Carson dan Lester D. Friedman (eds.). *Shared Differences: Multicultural Media and Practical Pedagogy*. Chicago: University of Illinois Press, 1995, hlm. 6.
- Parekh, Bhiku. *Rethinking Multiculturalism*, penerj. Bambang Kukuh Adi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1996.
- Santayana, George. *Life of Reason in Common Sense*. New York: Charles Scribner's Sons, 1905.
- Snow David A. dan CrossRemi. "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types." Dalam *Journal of Strategic Security*, Vol. 3, 2011.

Taşpınar, Ömer. “Fighting Radicalism, not ‘Terrorism’: Root Causes of an International Actor Redefined.” Dalam *SAIA Review* Vol. XXIX, No. 2, John Hopkins University Press, 2009.

Thompson, John B. *Kritik Ideologi Global*, Haqqul Yakin (pen.), Yogyakarta: IGCiSoD, 2004.

Internet:

“Politik Identitas,” dalam *www.wikipedia.org*.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme—ISIS,” dalam *belmawaristekdikti.go.id*.

Banks, James A. “Multicultural Education—History, the Dimensions of Multicultural Education, Evidence of the Effectiveness of Multicultural Education.” Dalam <http://education.stateuniversity.com/ /Multicultural-Education.html>.

Multiculturalism, dalam <https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism>.

Nechayev, Sergey. *Catechism of Revolutionary* dalam <https://www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm>.